

MEREFLEKSIKAN PERUBAHAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar dari Direktur Eksekutif Yappika	
• Merefleksikan Perubahan	1
Kata Pengantar dari Pembina Yappika	
• Yappika di Tengah Perubahan Besar	3
Kata Pengantar dari Pengawas Yappika	
• Yappika Berhasil Menjalankan Mandatnya	5
Inisiatif dan Partisipasi yang Bergulir	
• Strategi Adaptif dalam Era yang Dinamis: Tantangan Kapitalisasi Pengetahuan dalam Perluasan dan Pendalaman Gerakan Sosial	6
• Benih itu Telah Berkembang	7
• "Yappika Cabang Desa"	8
Belajar dari Kerja-Kerja Penguatan OMS	
• Membangun Kembali Organisasi Masyarakat Sipil Aceh Pasca Tsunami	9
• Menjawab Tantangan Keberlanjutan Jaringan	10
• Keluwesan Manajemen Memicu Perkembangan Inisiatif (Pengalaman Yappika menerapkan RBM)	11
• Menarik Pembelajaran sebagai <i>Service provider</i> bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	12
Mendorong Kebijakan Hak Pelayanan Publik yang Adil & Berkualitas	
• Jalan Panjang Mengawal RUU Pelayanan Publik	13
• Mengkomunikasikan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Melalui Deteksi Dini Kanker Payudara	14
• Kerja-Kerja Kolaboratif untuk Mengkomunikasikan Hak Pelayanan Publik dengan Yappika Life	15
Komentar Evaluator Program TPLD	
• Oleh: Hetifah Syaifudin	16
Perencanaan Strategis Yappika 2008 – 2012	
• Visi, Misi, Peran, Isu Strategis	18
• Empat Belas (14) Nilai-Nilai Dasar yang Dianut Yappika	19
Sinergi Kerja Yappika Dalam Kemitraan	
• Program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil Aceh	20
• Program Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TPLD)	20
• Advokasi RUU Pelayanan Publik	21
• Program Penguatan Kapasitas Jaringan Kerja Masyarakat Sipil Kabupaten	21
• Program Deteksi Dini Kanker Payudara	21
• Pelibatan Relawan	21
Majalah dan Buku Terbitan Yappika periode April 2007- Maret 2008	
• Majalah	22
• Buku-buku	22
Laporan Keuangan Yappika 2007	
• Statement Auditor, Hasil Audit 2007 & Laporan Keuangan	23



Lili Hasanuddin
Direktur Eksekutif Yappika

Merefleksikan Perubahan

Pertanyaan yang seringkali mencuat ketika sebuah program dilaksanakan adalah sejauh mana program tersebut memberikan kontribusi terhadap perubahan sosial, baik di tengah masyarakat, relasi antara masyarakat dengan pengambil keputusan maupun perubahan di tataran kelembagaan dari pelaksana program itu sendiri.

Pertanyaan serupa itulah yang juga muncul di benak kami, ketika program-program jangka panjang yang kami lakukan mendekati akhir masa pelaksanaannya di lapangan. Pertanyaan itu mencuat karena kami tidak ingin terjebak dengan beberapa pengalaman yang pernah ada bahwa sebuah program berakhir, ya sekedar berakhir begitu saja. Tidak terlihat perubahan yang berarti di kalangan masyarakat luas, bahkan tidak terjadi perubahan apa pun di lembaga-lembaga pelaksana program. Berakhirnya program hanya ditandai dengan berakhirnya kesibukan atas apa yang selama ini dilaksanakan menyangkut program tersebut.

Berangkat dari cara pandang seperti itulah, maka dalam tahun 2007 ini Yappika memfokuskan perhatian untuk menelisik seluruh perjalanan pelaksanaan program dan berusaha melihat perubahan-perubahan yang terjadi, baik di tingkat masyarakat maupun lembaga pelaksana yang didukung Yappika. Semuanya ini dilakukan untuk menarik pembelajaran yang dapat dipetik dan digunakan pada masa-masa mendatang.

Sebuah perubahan yang menggembirakan hati kami adalah meningkatnya kemampuan masyarakat sipil –baik organisasi pelaksana maupun masyarakat dampingan– dalam membangun relasi dan interaksi dengan pengambil keputusan serta menggalang dukungan publik sehingga berhasil mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang memberikan perhatian kepada kepentingan masyarakat setempat. Beberapa kebijakan daerah berhasil didorong untuk disahkan di beberapa wilayah kerja Yappika, mencakup kebijakan pengelolaan sumber daya alam, penataan kawasan, penganggaran dan keadilan gender; dan beberapa usulan yang diakomodasikan dalam kebijakan-kebijakan nasional.

Perubahan pada tataran kebijakan ini sekaligus mencerminkan perubahan yang terjadi di tataran lembaga yang melaksanakan program. Perubahan-perubahan di tingkat lembaga ini terkonfirmasi pada saat kami melakukan *assessment* peningkatan kapasitas dengan menggunakan ODSST (*Organizational Development Snap Shot Tools*), yakni sebuah alat yang dirancang khusus untuk melihat perubahan yang terjadi pada tingkat lembaga. Hasil ODSST menunjukkan bahwa secara keorganisasian terjadi perbaikan tata kepengurusan (*governance*) yang mengarah pada model pengelolaan organisasi yang memberikan ruang lebih luas bagi keterlibatan staf maupun mitra kerjanya dalam pengambilan keputusan strategis organisasi (*participatory*), lebih terbuka dalam pengelolaan data dan keuangan (*transparent*), dan bertanggung gugat terhadap metode kerja yang dipilih dan hasil kerja yang diperoleh (*accountable*).

Pada hampir seluruh mitra Yappika yang dinilai, terlihat adanya distribusi kewenangan dalam organ organisasi, maupun upaya untuk pengembangan *standard operational procedure* (SOP) keuangan, SDM, dan pengelolaan program dalam organisasi.

Dari sisi orientasi organisasi, mitra Yappika semakin melihat eratnya kaitan antara setiap persoalan yang berkembang di masyarakat (kemiskinan, jender, sumber daya alam) dengan kebijakan pemerintah dan tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu terjadi perluasan jaringan kerja mitra, serta peningkatan kualitas hubungan dengan *stakeholder* strategis.

Untuk mitra-mitra Yappika yang bersifat jaringan, perubahan terlihat dalam mencermati persoalan-persoalan yang berkembang dan merumuskannya sebagai isu untuk diadvokasikan secara bersama. Meskipun tidak semua isu yang ada berhasil ditampung, tetapi melalui diskusi dan perdebatan panjang antar berbagai kelompok OMS, wakil-wakil masyarakat--termasuk kelompok perempuan miskin-- dan *stakeholder* kunci disepakati isu-isu prioritas yang penting untuk ditangani. Selain itu, pendekatan pengembangan jaringan telah memberi kesempatan kepada kalangan OMS untuk saling bekerjasama, saling belajar dan saling berbagi kapasitas dalam menjalankan kerja-kerja advokasi.

Di tingkat masyarakat, perubahan sangat jelas terlihat pada konsolidasi antar sesama anggota komunitas maupun organisasi rakyat, dan kemampuan dalam menemukan persoalan yang mereka hadapi untuk diangkat sebagai tema advokasi kebijakan di daerah bersangkutan. Selain itu, meningkat pula daya kritis masyarakat dalam menilai pelaksanaan pembangunan sehingga jika terlihat adanya inkonsistensi pemerintah daerah selalu disikapi dengan aksi protes secara terbuka.

Kami sadar, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi tersebut hanyalah awal untuk meningkatkan peran masyarakat sipil lebih lanjut ke depan. Perubahan kebijakan bukanlah sebuah akhir dari perjuangan untuk mendorong tata pemerintahan lokal menjadi demokratis, karena masih harus dilihat implementasi kebijakan tersebut. Bagaimana pun, sebuah dokumen kebijakan akan menjadi benda mati yang tidak akan memberikan pengaruh apa pun jika tidak ada pengawalan lebih lanjut. Pada sisi lain, kelembagaan yang sudah tertata tidak akan bertahan lama, jika tidak diikuti dengan kreatifitas para pengelola lembaga untuk menjaga keberlanjutannya. Persoalan keberlanjutan memang masih menjadi tantangan yang cukup besar, baik di tingkat mitra, Yappika maupun masyarakat dampingan. Misalnya keberlanjutan lembaga mitra dalam menindaklanjuti capaian-capaian yang telah diperoleh, keberlanjutan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan serta keterbukaan maupun konsistensi Pemda dan DPRD untuk mengimplementasikan kebijakan secara partisipatif.

Seluruh narasi itulah yang termuat dalam laporan tahunan kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberi dukungan kepada Yappika selama ini.



Stanley Adi Prasetyo
Pembina Yappika

Yappika di Tengah Perubahan Besar

Masyarakat yang mengikuti secara dekat perjalanan Yappika akan mengacungkan jempolnya kepada lembaga ini, yang berhasil mempertahankan eksistensinya dan menjalankan cita-cita sebagaimana pernah dituangkan dalam statuta lembaga ini. Memasuki usianya yang ke 17, jajaran manajemen Yappika telah membuktikan bahwa kerja untuk mewujudkan masyarakat sipil yang kuat di atas bangunan demokrasi bukan hanya sekadar kata-kata. Dalam buku laporan ini Yappika membuktikan bahwa lembaga ini dengan dukungan CIDA dan USC telah mempertahankan hubungan kemitraan dengan 24 lembaga yang tersebar di 7 propinsi.

Kini ketika reformasi memasuki usia 10 tahun, lansekap politik-ekonomi Indonesia mengalami perubahan drastis. Demikian pula pandangan dunia internasional terhadap Indonesia. Di mata sejumlah lembaga donor internasional, Indonesia sudah bukan bagian dari prioritas negara yang perlu mendapat bantuan. Indonesia telah berubah menjadi negara demokratis, di mana pemerintahnya juga telah menyatakan tekadnya untuk mengurangi jumlah bantuan luar negeri. Negara Timur Tengah atau negara berkembang yang cenderung dikelompokkan sebagai negara gagal (*fail state*) seperti halnya Timor Leste lebih menaruh minat lembaga donor Internasional untuk menyalurkan dana. Internasionalisasi kerja Ornop di Aceh pasca-tsunami pada 2009 bukan tak mungkin bakal mengalami pengempisan luar biasa pasca habisnya mandat Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) pada 2009 mendatang.

Yappika, sebagaimana juga lembaga organisasi non-pemerintah (Ornop) lain, berada pada sebuah titik ujian. Sejumlah Ornop di Indonesia kini menghadapi masa krisis dan tengah berlutut dengan masalah pencarian lembaga donor baru atau lembaga donor alternatif. Banyak di antara Ornop di Indonesia yang mengalami krisis dan bahkan memasuki masa kolaps akibat perubahan yang sedang terjadi di negeri ini dan juga di peta politik bantuan internasional. Yappika sebagai sebuah Ornop yang bekerja dalam paradigma ke-3, yaitu paradigma reformasi, juga tengah menghadapi ujian berat. Kita semua barangkali dengan cemas bertanya-tanya, apakah Yappika bisa melewati masa ujian ini atau tidak.

Terus terang organisasi yang bekerja dengan paradigma ke-3 seperti memperketat pengawasan, memperbaiki manajemen pelayanan umum, meningkatkan disiplin hukum seperti yang sudah tidak terlalu populer di masa kini. Ada banyak ornop memilih beralih untuk bekerja dalam paradigma ke-4 (liberasi) atau malah mengubah visi-misi sesuai paradigma ke-5 (transformasi). Pekerjaan baru yang lebih menantang seperti melakukan pendidikan politik populer, mencetak kader gerakan, penyadaran politik, pengorganisasian rakyat basis, mobilisasi aksi, dan lainnya dianggap lebih menantang. Namun, pilihan Yappika untuk bekerja dalam lingkup paradigma ke-3 agaknya juga bukan pilihan yang tak punya nilai "politis". Kesadaran untuk membangun masyarakat sipil dan memperkuat peranan organisasi masyarakat sipil (OMS) adalah pilihan politik demi memperkuat demokrasi yang bukan sekadar memenuhi demokrasi prosedural.

Proses keberlanjutan lembaga Yappika, kini tengah diuji. Di tengah pilihan untuk konsisten dengan “pilihan hidup”, Yappika tengah diuji apakah kerja-kerjanya secara konkret masih dibutuhkan masyarakat. Hal ini barangkali bisa diuji dengan banyaknya minat para relawan untuk bergabung, adanya dukungan dan inisiatif kelompok masyarakat atau perusahaan kepada Yappika. Juga lepasnya ketergantungan Yappika kepada satu atau dua lembaga donor besar menjadi mengalirnya dukungan multi-lembaga donor untuk mewujudkan pekerjaan jangka panjang.

Pekerjaan rumah Yappika masih bertumpuk. Negara-bangsa Indonesia hingga kini masih dibelit berbagai persoalan. Mulai dari jumlah kemiskinan dan pengangguran yang membengkak, korupsi, pelanggaran HAM, hingga ancaman neoliberal dan globalisasi. Yappika perlu bekerja lebih keras dan mengatur langkah-langkah lebih lanjut agar tak terseret pada arus pusaran politik yang akan membesar menjelang putaran Pemilu 2009.***

Hasil Index Masyarakat Sipil (IMS) yang dilakukan Yappika menunjukkan bahwa masyarakat sipil di Indonesia telah membuat kemajuan dalam bekerja untuk dan mempromosikan nilai-nilai serta tujuan-tujuannya, juga mengidentifikasi berbagai area untuk perbaikan. Outcome dari implementasi IMS ini cukup bermakna bagi beragam pihak (stakeholders) di Indonesia dan beberapa bagian lain di dunia. CIVICUS memberikan penghargaan kepada Yappika atas berbagai upaya yang telah dilakukannya dalam memperkuat masyarakat sipil dan menyediakan banyak pembelajaran untuk stakeholder yang relevan di Indonesia serta masyarakat sipil di dunia.

(Kumi Naidoo, Sekretaris Jendral CIVICUS)



Th. Trisna Ansarli
Pengawas Yappika

Yappika Berhasil Menjalankan Mandatnya

Tanpa terasa, kembali Pengurus yang sekaligus eksekutif Yappika harus mempertanggungjawabkan hasil karyanya, setelah setahun menjalankan fungsi dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya sebagai pengelola lembaga. Sebagai salah satu perangkat organisasi yang dipercayakan menjalankan fungsi Manajemen Pengawasan bagi lembaga, merasa perlu menyampaikan hasil pengamatan menyeluruh yang meliputi Keorganisasian, Pencapaian sasaran Program yang digariskan beserta nilai-nilainya dan Pengelolaan Keuangan melalui kegiatan supervisi dan internal audit yang telah dilaksanakan per triwulan.

Dari aspek keorganisasian tampaknya Pengurus telah berupaya melaksanakan tata kelola yang baik melalui kebijakan-kebijakan yang digariskan berlandaskan konstitusi berupa AD/ART yang telah disahkan. Selain itu juga menerapkan Manajemen dengan Sasaran (*Result Based Management*) yang mengacu pada perwujudan visi dan misi Yappika.

Program-program telah dilaksanakan melalui perencanaan strategis dengan analisis kondisi sosial, politik dan budaya secara tajam. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, Pengurus beserta segenap staf eksekutif yang ada telah menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan perannya melalui kerja sama yang kohesif dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, hingga dapat mencapai hasil karya beserta penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagaimana yang dapat kita rasakan bersama saat ini.

Untuk mencapai hasil karya tersebut secara efektif, Pengurus beserta staf eksekutif telah berupaya mengelola sumber dana program yang tersedia secara efisien. Hal ini dapat dilihat dari rasio-rasio berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2007 yang di paparkan dalam audit keuangan. Terlihat bahwa sumber-sumber terbesar masih didukung oleh dana program yang berasal dari lembaga donor.

Melihat kenyataan ini, Pengurus selaku *Executive Boards* telah berusaha untuk mengendalikan pelaksanaan program dan operasional Sekretariat secara efektif dan efisien. Dapat dikatakan mereka telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya secara proporsional.

Demikianlah sekilas hasil pengamatan kami dan berdasarkan supervisi internal yang sempat kami lakukan. Tidak berlebihan bilamana pada kesempatan ini kita sampaikan apresiasi kita atas dedikasi yang telah ditunjukkan dalam bentuk kerja sama yang kohesif antara Pengurus dan para staf Eksekutifnya serta mengelola Sekretariat Yayasan di tahun 2007. Selamat !

Strategi Adaptif dalam Era yang Dinamis: Tantangan Kapitalisasi Pengetahuan dalam Perluasan dan Pendalaman Gerakan Sosial

"Jika Organisasi-Organisasi Pembangunan Non-Pemerintah tidak belajar dari pengalaman mereka, mereka akan diabaikan dan berhenti sebagai agen-agen perubahan sosial"

(Alan Fowler, 1997)

Dukungan *Partnership Program for Development Phase II* (PPD II) melalui Program Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TPLD) terhadap mitra kabupaten, berhasil mendorong terjadinya interaksi, komunikasi dan dialog kebijakan yang efektif antara Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan pemerintah di berbagai tingkatan. Dari 16 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh para mitra, 6 di antaranya telah disahkan, 3 draft dalam proses pembahasan, 6 draft masih menunggu pembahasan, 1 draft sudah diusulkan namun ditolak oleh legislatif dan 2 draft tidak diajukan. Interaksi yang telah terbangun dengan pengambil kebijakan tersebut merupakan modal sosial yang potensial untuk dikapitalisasi mendesakkan berbagai kebijakan lain yang pro rakyat.

Jika dicermati, perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. **Pertama**, berapa besar isu yang didorong tersebut sensitif atau 'mengganggu' kepentingan elit berkuasa. Misalnya isu anggaran menjadi contoh isu yang sensitif. Seluruh Ranperda yang telah **disahkan** menjadi Perda tidak ada satupun yang berkaitan dengan isu anggaran yang sarat dengan kepentingan elit berkuasa. **Kedua**, keragaman strategi dan ketepatan penggunaannya sesuai situasi lokal. Lembaga yang kaya strategi dan mampu menyesuaikan perubahan situasi yang terjadi. Misalnya, jika pemerintah lokal cukup tertutup, maka aksi massa bisa menjadi pilihan ketika lobby dan dialog formal tidak berhasil. Sementara itu pada situasi pemerintah yang lebih terbuka, maka aksi konfrontatif justru kontra produktif. **Ketiga**, keluwesan sikap. Kebijakan adalah produk dari proses politik dimana negosiasi dan tawar menawar kepentingan menjadi keharusan sehingga keluwesan sikap dalam melakukan negosiasi akan sangat menentukan. **Keempat**, Intensitas interaksi, komunikasi dan dialog. Intensitas pertemuan akan meningkatkan saling pemahaman dan menumbuhkan kepercayaan, sehingga hubungan-hubungan yang sebelumnya formal berkembang menjadi informal.

Fenomena menarik lainnya adalah **program TPLD telah mendorong terjadinya "pergerakan ke tengah" dalam strategi advokasi**. Mitra yang sebelumnya hanya mengenal pendekatan konfrontatif dengan pemerintah dan berpendapat bahwa OMS selalu benar dan pemerintah selalu salah, mulai mengembangkan pendekatan yang mengedepankan dialog. Pergerakan yang sama, namun dari arah yang berbeda, terjadi pula pada lembaga mitra yang sebelumnya cenderung hati-hati untuk bersikap konfrontatif terhadap pemerintah. Tipikal mitra yang kedua ini mulai bersikap lebih kritis terhadap pemerintah selaku pihak yang memproduksi kebijakan yang cenderung sarat kepentingan elit sehingga menimbulkan sejumlah persoalan bagi masyarakat. Menyadari hal ini, mitra tersebut mulai mengembangkan pendekatan yang dialogis dengan pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan. Ternyata model komunikasi ini lebih bisa diterima pemerintah.

Perubahan strategi tersebut tentu saja hanya sebagian kecil dari upaya merespon perubahan lingkungan yang dinamis. Oleh sebab itu, ke depan lembaga mitra dan Yappika harus secara progresif dan luwes memperkaya dan menyempunakan strategi mengikuti perubahan. Penopang keunggulan sebuah organisasi adalah kesediaannya untuk terus belajar dan berpikir terbuka dalam mendorong perubahan. Dengan demikian, sebuah organisasi harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi organisasi pembelajar.



Pertemuan Mitra Program
Tata Pemerintahan Lokal
yang Demokratis (TPLD)
di Kuta Beach Hotel, Bali.

Yappika tidak 'bunyi' di media. Asumsi ini benar jika media yang reporternya tidak tekun, teliti membaca sekaligus menganalisis suatu isu yang datang dari kalangan non pemerintah.

Kebetulan saya tahu, Yappika adalah satu institusi yang sangat terbuka dan sering mengambil inisiatif, mengajak institusi lain untuk mengkaji dan merumuskan suatu masalah yang menjadi isu nasional. Tapi kerendahan hati itu pula yang menyebabkan Yappika tak 'bunyi' di media. Yang muncul kemudian adalah institusi dan para aktivis yang diajak kerja olehnya.

Ke depan, Yappika tetap harus meningkatkan keramahannya terhadap institusi lain sambil tak lupa memposisikan dirinya di percaturan dinamika nasional. Cara itu bisa jadi meningkatkan kekritisn keluarga besar Yappika sekaligus keberanian untuk tampil ke muka dan di depan.

(Aa Sudirman, wartawan senior harian Suara Pembaruan)

Benih itu Telah Berkembang

Tak terasa, keterlibatan relawan di Yappika telah berlangsung selama 5 tahun. Berbagai autokritik terhadap keterlibatan mereka serta masukan dari pihak di luar Yappika telah mewarnai perkembangan mereka bersama Yappika. Mereka belum masuk dalam jajaran ahli yang mempunyai keahlian khusus untuk mendukung kerja-kerja Yappika. Peningkatan kapasitas seperti pelatihan, diskusi dan keterlibatan langsung dalam kerja-kerja Yappika di Jakarta; merupakan benih yang disemai untuk mendukung menjadi 'seseorang' yang bermakna dan mampu memberikan kontribusi terhadap cita-cita perubahan sosial yang lebih baik.

Nampaknya, benih itu kini telah berkembang. Tanggung jawab, kemandirian dan rasa kepemilikan terhadap cita-cita perubahan semakin meningkat. Muncul pula ide-ide kreatif untuk mempromosikan kesukarelawan kepada pihak yang lebih luas, keinginan untuk memperluas ruang beraktivitas dan kemandirian dengan memanfaatkan kapasitas yang telah diperoleh dari Yappika selama ini maupun dari tempat lain. Hal ini didorong oleh kesadaran bagaimanapun Yappika mempunyai keterbatasan dalam menyediakan arena ekspresi bagi relawan.

Perkembangan di atas memunculkan apresiasi dan kepercayaan pihak lain terhadap relawan Yappika. Misalnya; diterimanya tawaran relawan Yappika untuk melatih review media kepada lembaga pers mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan biaya dari pihak jurusan serta apresiasi beberapa warga dan aparat pemerintahan di wilayah kecamatan Koja Jakarta Utara terhadap keseriusan mengorganisasi warga pada program deteksi dini kanker payudara.

Kini, tantangan pun beranjak ke ranah yang lain. Bukan hanya bagaimana membangun tim dan meningkatkan ketrampilan relawan, namun bagaimana membuat mereka percaya diri dan memotivasi untuk terus berkarya menciptakan arena-arena ekspresi kesukarelawanan yang mendidik sekaligus sinergi dengan cita-cita Yappika.



Volunteer Gathering Yappika 2008
di Bumi Perkemahan Ragunan Jakarta.

Yappika sebagai lembaga yang melibatkan relawan dalam setiap kegiatan, sangat memberikan banyak perubahan bagi hidup saya. Peningkatan kapasitas seperti jurnalistik, analisis media dan pelatihan komputer sangat bermanfaat bagi kuliah dan kehidupan saya sehari-hari. Yappika juga memberikan kesempatan bagi relawan untuk mengembangkan diri dengan memberikan fasilitas seperti perpustakaan dan internet secara gratis. Bagi saya, Yappika merupakan rumah kedua dimana saya bisa mengembangkan diri dalam bidang organisasi.

(Leonardo Jumarfor Samosir, koordinator relawan Yappika)

“Yappika Cabang Desa”

Gambar itu masih terpajang di perpustakaan Yappika. Sebuah goresan yang sederhana berbentuk rumah dengan tulisan “Open” di pintunya. Di halamannya tergambar papan dengan tulisan “Yappika cabang desa”. Siapa saja yang melihat gambar itu pasti akan mengerutkan kening dan berpikir sejak kapan Yappika membuka cabang di desa, di desa mana adanya, atau bahkan menebak-nebak bahwa yang dimaksud adalah kantor Yappika di Aceh.

“Yappika cabang desa” adalah hasil goresan gambar Safitri Difa Kaluza, siswi Sekolah Dasar kelas 6 yang merupakan salah satu pengunjung perpustakaan Yappika. Safitri bermaksud melukiskan paviliun kecil depan kantor Yappika yang dijadikan perpustakaan. Di pintu masuk perpustakaan Yappika tergantung tulisan open, dan inilah yang tampaknya ingin ia sampaikan.

Jika diperhatikan, gambar tersebut merupakan perwujudan keinginan adanya tempat seperti perpustakaan Yappika terus ada di sekitar lingkungan mereka. Selama ini anak-anak memang merasa dekat dengan perpustakaan Yappika. Mereka menggunakannya sebagai tempat membaca dan sekaligus tempat alternatif untuk bermain di antara padatnya pemukiman di Jakarta yang tidak menyisakan ruang bermain buat mereka. Oleh karenanya protes dari anak-anak pun sering muncul ketika perpustakaan Yappika terpaksa ditutup karena suatu hal.

Setiap hari Kamis, perpustakaan Yappika secara rutin mengadakan kelas menggambar bagi anak-anak. Sebagai penghargaan, karya yang terpilih akan dipajang di mading perpustakaan. Hal tersebut ternyata memacu semangat anak-anak untuk membuat gambar yang bagus karena merupakan kebanggaan tersendiri ketika hasil karyanya dipajang. Selain itu, cara ini juga membuat mereka ikut merasa memiliki perpustakaan Yappika.

Apresiasi positif juga muncul dari para orang tua warga sekitar kantor Yappika. Para orang tua yang semula hanya sekedar mengantar dan menemani anaknya, lama kelamaan ikut memanfaatkan perpustakaan dan bahkan ada yang turut menyumbangkan buku-buku bekasnya.

Bagi Yappika, antusiasme warga sekitar dalam memanfaatkan perpustakaan Yappika adalah sebuah keberhasilan dalam mendorong gerakan literasi. Melalui buku dan perpustakaan inilah Yappika bisa lebih mendekatkan diri pada komunitas setempat, masyarakat yang menjadi basis dari perjuangannya.

Hasil Karya salah satu anak pengunjung
perpustakaan Yappika yang diberi tema
“Yappika Cabang Desa”.



Membangun Kembali Organisasi Masyarakat Sipil Aceh Pasca Tsunami

Upaya membangun kembali kekuatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Aceh melalui program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil Aceh (Acehnese Civil Society Organization Strengthening/ANCORS) dilakukan Yappika sejak tahun 2006. Inisiatif ini didasari oleh akibat bencana tsunami yang melanda Aceh pada akhir tahun 2004 yang menelan lebih dari 109 ribu orang, menghancurkan sekitar 45 kantor LSM di beberapa kabupaten dan menewaskan lebih dari 100 orang aktivis LSM. Hasil pemetaan kondisi OMS pasca tsunami pada tahun 2005 mengindikasikan bahwa OMS Aceh perlu memperoleh peningkatan kapasitas untuk mampu berpartisipasi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Selain itu, Aceh memasuki babak baru perdamaian setelah lebih dari 30 tahun berada dalam konflik kekerasan horisontal, dimana masih cukup rawan terjadi pergolakan. Kedua situasi tersebut dianggap penting untuk menumbuhkan kembali peran OMS dan atau memperkuat OMS yang masih ada, guna turut mendukung terciptanya keseimbangan kekuatan di ranah sosial politik dan perdamaian di masa datang dan pada waktu yang tengah berjalan.

Perkembangan cukup positif telah terjadi selama program berjalan. **Di sisi kelembagaan**, proses pelembagaan organisasi telah terjadi dan berhasil dijalankan oleh 14 OMS mitra program di level kabupaten. Aturan organisasi telah tersusun secara sistematis dan kian hari semakin konsisten dijalankan. **Di sisi penguatan gerakan di level kabupaten**, terjadi peningkatan kemampuan dalam melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan. Para mitra cukup mampu membuat kajian atau analisis kebijakan yang dapat dinegosiasikan dengan pemerintah setempat, mampu membangun dan mengembangkan relasi dengan para pihak setempat untuk mendukung kerja advokasi serta mulai cukup intens mengorganisasi kelompok-kelompok masyarakat dampingan.

Sementara itu di tingkat propinsi, 2 mitra utama program, yaitu ADF (Aceh Development Fund) dan IMPACT (*Inspiration for Managing People's Action*), menunjukkan peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan dalam mendukung kerja-kerja mitra kabupaten. Upaya penguatan OMS juga diperluas melalui dukungan kepada 2 jaringan OMS di tingkat propinsi. Yappika juga aktif terlibat dalam kerja-kerja advokasi yang dilakukan Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP) Aceh. Pelibatan dan dukungan berbagai tingkat dan ragam OMS tersebut merupakan strategi merajut kembali kekuatan OMS di Aceh.



Bermain peran melakukan konferensi pers pada pelatihan strategi kampanye dan relasi media yang diikuti oleh para mitra Program ANCORS.

Salah satu pembelajaran utama yang bisa dipetik dalam upaya membangun kembali OMS pasca tsunami di Aceh adalah bahwa perubahan dan kemajuan OMS sangat ditentukan oleh diri OMS tersebut. Konsistensi atas komitmen yang telah dibangun menjadi salah satu ukuran, baik komitmen terhadap tanggung jawab program ataupun komitmen dirinya sebagai bagian dari agen perubahan. Kesibukan luar biasa para aktivis Aceh oleh berlimpahnya kucuran dana pasca tsunami, menjadi tantangan penting dalam membangun fokus gerakan masyarakat sipil Aceh ke depan.

Program ANCORS yang diinisiasi oleh YAPPIKA selama dua tahun ini sangat membantu penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) di daerah, termasuk staf Yayasan PAPAN. Kegiatan yang dilakukan adalah pengorganisasian komunitas pendidikan dalam melakukan advokasi anggaran sektor pendidikan di kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Undang Undang dan adanya efisiensinya anggaran yang menyentuh nilai-nilai kemajuan pendidikan.

Pada level pemerintah di Kabupaten Aceh Barat, telah terjadi perubahan yang sangat berarti dalam proses pengambilan kebijakan termasuk kebijakan anggaran, dimana kebijakan telah mulai dilakukan secara Partisipatif dan Transparan. Hal ini sekali lagi tidak terlepas dari andil Yappika dalam mencetak kader-kader di daerah dalam melakukan advokasi dan pengorganisasian masyarakat.

(Alfaizin. MA, Koordinator Program Yayasan PAPAN)

Menjawab Tantangan Keberlanjutan Jaringan

Banyak orang bersepakat bahwa kerja berjaringan amatlah penting. Umumnya karena orang menyadari keterbatasan dirinya. Bekerja sama dan menghimpun dukungan dari pihak lain menjadi keniscayaan agar cita-cita bersama tercapai. Kerja berjaringan memungkinkan orang mensinergikan sumberdaya dan kekuatannya untuk mendapatkan hasil-hasil yang jauh lebih besar dari pada bekerja secara sendirian. Kesadaran itulah yang telah bersemi dan terus tumbuh pada sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di 8 kabupaten (Sumba Barat, Sumba Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Jeneponto, Bantaeng, Muna dan Buton) di mana Yappika bekerja. Namun disadari bahwa kesadaran saja tidak cukup untuk membangun jaringan kerja yang kuat, solid dan efektif. Kesadaran harus diturunkan dalam praktek kerja, dievaluasi, dikembangkan kembali dan pada akhirnya menjadi budaya karena telah terbiasakan.

Pengalaman Yappika bersama 8 Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) kabupaten menegaskan pentingnya bagi jaringan untuk menjadikan setiap aktivitas kerjanya sebagai bagian dari konsolidasi dengan anggotanya, dan tidak semata fokus pada tujuan eksternalnya. Advokasi kebijakan dapat menjadi tujuan eksternal dari jaringan, namun setiap langkah advokasi yang ditempuh haruslah dirumuskan, didiskusikan, ditetapkan, diinformasikan, dievaluasi dan dikembangkan kembali bersama setiap anggotanya. Jika hal ini telah dilakukan, tidak mustahil jaringan akan mampu melakukan mobilisasi sumber daya dan berhasil memperjuangkan tuntutan dan cita-cita bersama serta mendorong kekuasaan politik dan negara yang demokratis, dengan atau tanpa dukungan donor.



Lokakarya penyusunan platform bersama oleh jaringan masyarakat sipil di Sumba.

Keluwesannya Manajemen Memacu Perkembangan Inisiatif

Pengalaman Yappika menerapkan RBM

Adalah betul bahwa manajemen dibuat untuk melaksanakan program secara tertata, tetapi akan menjadi salah jika manajemen justru mengkerangkeng inisiatif dan kreatifitas orang-orang yang melaksanakan program tersebut. Karena itu, memadukan antara penataan dan keluwesannya merupakan sebuah seni dalam menggunakan manajemen itu sendiri.

Bagi lembaga yang bergiat di bidang advokasi, momentum merupakan salah satu "sumber daya" yang harus dimanfaatkan. Ketika momentum terlewat, maka lepas pula peluang untuk meraih keberhasilan dari lembaga advokasi bersangkutan. Contoh yang sangat sederhana dapat dilihat pada saat proses pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) atau Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Ketika ada sebuah gagasan yang akan didorong untuk terakomodasi dalam RUU/Raperda tersebut, maka proses pembahasan adalah momentum yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Jika kebijakan tersebut sudah disahkan, maka segala upaya perumusan rekomendasi sudah tidak bermakna apa pun. Dalam konteks inilah maka momentum bisa diartikan dengan sumber daya. Sebuah lembaga mungkin memiliki sumber daya orang, tenaga dan uang, tetapi ketika momentum sudah terlewat, seluruh sumber daya tersebut tidak akan dapat digunakan lagi.

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang advokasi, sambil sekaligus meningkatkan kapasitas OMS lain melakukan advokasi, pemahaman tersebut mewarnai manajemen yang dilakukan Yappika. Pendekatan manajemen yang digunakan Yappika untuk mengakomodasi kebutuhan ini adalah manajemen berbasis hasil (Result Based Management/RBM). RBM memberikan keleluasaan bagi setiap pihak untuk melakukan perubahan kegiatan --termasuk mengatur waktu pelaksanaan kegiatan-- sesuai dengan kondisi yang ada, selama perubahan-perubahan itu dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Meskipun demikian, sebagaimana prinsip dasar manajemen, yakni sebuah upaya untuk melakukan kegiatan secara tertata, harus pula diikuti. Sekali kesepakatan dibuat, tidak bisa diubah semauanya, tanpa dasar dan alasan yang kuat. Perpaduan antara pemahaman atas "momentum" dan pelaksanaan kegiatan secara tertata --dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan-- inilah yang diterapkan oleh Yappika, baik dalam membangun kerja sama dengan lembaga mitra maupun di dalam Yappika sendiri.

Dari pengalaman menerapkan pendekatan manajemen ini terlihat bahwa para pelaksana program memiliki keleluasaan untuk melakukan adaptasi terhadap kondisi yang berkembang, sekaligus membangkitkan inisiatif dan kreatifitas mereka dalam melakukan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Keluwesan pendekatan RBM menyebabkan para pelaksana program, baik di dalam Yappika maupun di kalangan mitra, tidak terkungkung oleh kekakuan sebagaimana yang biasa dijumpai pada pendekatan manajemen lain, sambil tetap memberikan perhatian terhadap hasil-hasil yang harus dicapai sesuai dengan rancangan yang sudah disusun dalam perencanaan.

Yappika telah bekerja keras untuk mengkombinasikan antara profesionalisme dan gerakan masyarakat di tingkat lokal. Melalui dukungan peningkatan kapasitas kepada organisasi masyarakat sipil di tingkat kabupaten dan desa, Yappika berupaya mendemokratisasikan pembelajaran sehingga pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan tidak dimonopoli oleh para 'ahli' saja.

(Tom Walsh, Koordinator Program PPD II)

Menarik Pembelajaran sebagai *Service provider* bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

Se serupa dengan ribuan OMS di Indonesia, isu keberlanjutan dan kemandirian lembaga juga menjadi isu krusial bagi Yappika. Walaupun Yappika memiliki sejarah panjang bekerja sama dengan CIDA/USC Canada selama lebih dari 15 tahun, hal itu tidak menjamin bahwa dukungan dana akan selamanya diperoleh. Apalagi dengan adanya perubahan konstelasi bantuan dari negara donor melalui *Paris Declaration* yang berimplikasi pada pengkonsentrasian bantuan melalui pemerintah.

Sejak tahun 2000-an, Yappika serius berperan sebagai penyedia layanan atau *service provider* bagi lembaga-lembaga (OMS dan donor) lain. Ciri utama sebagai lembaga yang melakukan penguatan OMS, melekat pada berbagai bentuk layanan Yappika, baik untuk penguatan kapasitas kelembagaan maupun individual. Layanan yang diberikan di antaranya adalah fasilitasi perencanaan strategis, manajemen program, monitoring dan evaluasi program, teknik fasilitasi, manajemen relawan, pengukuran indeks masyarakat sipil, pertemuan multistakeholder, strategi advokasi kebijakan, strategi kampanye publik, dll.

Variasi jenis layanan yang ditawarkan oleh Yappika di atas tidak bermula dari ruang kosong. Dalam arti, kapasitas-kekapasitas ini telah dimiliki Yappika sebagai syarat menjadi lembaga *intermediary* --yang tidak hanya mengucurkan dana tetapi juga memberikan berbagai asistensi teknis kepada lembaga mitra-- dan sekaligus menjadi lembaga implementor untuk advokasi kebijakan di tingkat nasional. Boleh dikatakan menjadi *service provider* adalah upaya Yappika untuk mengkapitalisasi ketrampilan staf dan kapasitas lembaga. Sehingga di satu sisi dengan menjadi *service provider* Yappika menjaga keberlanjutan dan kemandirian lembaga, di sisi lain juga memanfaatkannya sebagai arena/media bagi seluruh staf untuk mengembangkan kapasitasnya. Dalam sisi ini beberapa pembelajaran telah dipetik Yappika seperti berikut ini.

Pertama, pengembangan mekanisme *peer-learning* dalam lembaga. Mekanisme belajar di antara staf yang terlibat dalam kegiatan layanan biasanya dilakukan sebelum, di tengah, dan di akhir pelaksanaan kegiatan. Proses saling belajar ini selain membahas metodologi dan teknis, juga membahas gambaran situasi dan hasil terkait dengan konteks lokal masing-masing tempat. Mekanisme ini berfungsi untuk memperbaiki proses kegiatan dan layanan yang diberikan.

Kedua, mendapatkan pembelajaran berharga. Memberikan layanan tidak berarti hanya melakukan proses satu arah, tetapi dua arah. Artinya, Yappika sebagai pemberi layanan juga menyerap informasi dan pengetahuan baru selama berlangsungnya proses kegiatan dan interaksi dengan lembaga yang dilayani. Hal-hal baru ini akan terakumulasi sebagai sumber inspirasi pengembangan program maupun pendekatan-pendekatan kerja Yappika.

Ketiga, transfer pendekatan. Menjadi *service provider* ternyata membuka kesempatan bagi Yappika untuk mempromosikan pendekatan dan prinsip yang telah dipilih dan dipraktekkan. Misalnya Yappika mentransfer pendekatan program berbasis hasil (RBM – *Result Based Management*) kepada jaringan-jaringan OMS dalam program Penguatan OMS Kabupaten. Hal ini dilakukan karena Yappika meyakini bahwa pendekatan ini memberikan keleluasaan dan keluwesan manajemen di tingkat lembaga mitra untuk menyesuaikan diri dengan konteks lokalnya.

Jalan Panjang Mengawal RUU Pelayanan Publik

Sepanjang 2007, Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) masih terus berkutat dalam advokasi Rancangan Undang Undang (RUU) Pelayanan Publik. Berbagai agenda pun digelar untuk memastikan kepada publik dan kepada Komisi II DPR RI bahwa pembahasan RUU Pelayanan Publik harus segera diprioritaskan. Keberadaan RUU ini penting karena akan menjadi jaminan hukum bagi pemenuhan hak dasar rakyat melalui pelayanan yang adil dan berkualitas.

Tiga aras kerja-kerja advokasi telah dilakukan oleh MP3, yaitu penggodokan substansi kebijakan, lobby dan kampanye untuk memperoleh dukungan publik. Dalam hal ini, MP3 menitikberatkan “lobby intensif” sebagai ujung tombak penyampai aspirasi kepada para anggota DPR RI. Sementara itu, dua aras kerja advokasi lainnya adalah sarana pendukung vital proses tersebut. Pada akhir tahun 2007, tim substansi MP3 telah menghasilkan naskah akademis sandingan RUU Pelayanan Publik yang digunakan sebagai materi lobby. Upaya penggalang dukungan publik dalam bentuk seminar, lokakarya, penggalang petisi, *talkshow* radio dilakukan di simpul-simpul MP3 seperti Malang, Makassar, Bandung dan Jakarta. Pertemuan konsolidasi jaringan pun dilakukan untuk memperkuat soliditas jaringan.

Munculnya isu bahwa RUU Pelayanan Publik akan dikeluarkan dari agenda pembahasan DPR RI, mendorong MP3 secara kreatif melakukan tekanan kepada anggota DPR. Pada bulan Agustus 2007, MP3 membangun kerja sama dengan Komisi II DPR RI untuk menyelenggarakan pameran (DPR Civic Info Fair 2007) mengangkat tema “Saatnya Mewujudkan Pemenuhan Pelayanan Publik yang Adil dan Berkualitas”. Kegiatan ini diselenggarakan di gedung DPR RI dengan melibatkan 52 lembaga peserta pameran dan 6 lembaga yang secara aktif ikut menggelar diskusi publik dengan tema-tema terkait pemenuhan hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, penganggaran dan mekanisme komplain. Kegiatan ini berhasil mendorong Komisi II DPR RI mengeluarkan pernyataan politik bahwa RUU Pelayanan Publik tidak akan dikeluarkan dari agenda pembahasan legislasi nasional dan akan segera dibahas dengan mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat.

Penantian panjang untuk penyegearaan pembahasan RUU Pelayanan Publik di Komisi II DPR RI, akhirnya terjawab sudah. Pada bulan Desember 2007, Komisi II DPR RI akhirnya mengagendakan pembahasan RUU Pelayanan Publik dan proses pembahasan oleh Panitia Kerja (Panja) dinyatakan terbuka untuk umum.

Namun jalan untuk mengawal RUU Pelayanan Publik masih panjang. RUU ini dibahas di sela-sela pembahasan RUU Paket Politik yang secara politis jauh lebih seksi dibandingkan RUU Pelayanan Publik. Apakah kepentingan politik akan mengabaikan penantian publik yang panjang atas jaminan pelayanan publik yang adil dan berkualitas melalui RUU Pelayanan Publik? Hanya tersisa waktu satu tahun ke depan untuk memastikan penyelesaian pembahasan dan pengesahan RUU Pelayanan Publik oleh DPR RI pada periode 2004-2009. Publik harus mengawal proses tersebut untuk memastikan adanya jaminan hukum atas pemenuhan hak pelayanan publik yang adil dan berkualitas.



DPR Civic Info Fair 2007 di sepanjang selasar Gedung Nusantara III DPR/MPR RI.

Saya merasa bahwa kerja-kerja Yappika cukup inovatif dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat. Selain itu Yappika mampu membangun komunikasi yang tidak hanya sekedar menekankan kuantitatif namun juga kualitatif dengan pihak legislatif. Misalnya tidak hanya sebatas pertanyaan-pertanyaan tentang jadwal-jadwal pembahasan sidang, namun juga membangun ruang-ruang untuk mendiskusikan hal-hal yang bersifat substantif. Yappika juga cukup apresiatif, membangun komunikasi secara persuasif, tidak terlalu memberikan pendekatan dengan 'tekanan-tekanan' kepada anggota legislatif. Saya pikir ini cukup efektif dalam mempengaruhi proses legislasi maupun substansi kebijakan yang sedang diadvokasikan. Semoga Yappika semakin bersemangat dan optimis dalam kerja-kerjanya untuk perubahan ke arah perbaikan masyarakat.

(Sayuti Asyathri, Wakil Ketua Komisi II DPR RI)

Mengkomunikasikan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Melalui Deteksi Dini Kanker Payudara

"Sejak bulan Juni 2007, Yappika bekerja sama dengan Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta (YKPJ) melakukan program penelitian mengenai deteksi dini kanker payudara oleh para bidan yang terlatih di Kecamatan Koja Jakarta Utara. Melalui program ini, kaum perempuan dari kelas menengah ke bawah memungkinkan untuk memperoleh pelayanan kesehatan tentang kanker payudara yang cukup sulit diperoleh."

Bagi Yappika, program ini merupakan media untuk melakukan kampanye mengenai hak masyarakat terhadap akses pelayanan publik di bidang kesehatan, sekaligus mendorong implementasi kebijakan terkait. Sembilan orang relawan Yappika menjadi ujung tombak untuk mengorganisasi masyarakat serta mengembangkan kesukarelawan dari warga setempat. Mereka juga membantu peserta program dari warga miskin yang terdeteksi menderita kelainan yang perlu tindak lanjut penanganan medis, untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah. Pendampingan dilakukan bagi warga miskin yang belum mempunyai kartu asuransi kesehatan warga miskin (ASKESKIN atau GAKIN).

Selama perjalanan program, dua orang peserta dari warga miskin yang terdeteksi menderita kanker payudara telah didampingi relawan untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan. Keduanya tidak mempunyai kartu ASKESKIN maupun GAKIN. Proses advokasi untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis tersebut cukup berliku dan sempat menarik perhatian sebuah media cetak nasional selama 5 hari berturut-turut. Publikasi di media cetak ini cukup membantu kelancaran proses advokasi tersebut. Kini, keduanya telah menjalani operasi kanker payudara dan perawatan lanjutan di sebuah rumah sakit khusus kanker dengan kontribusi biaya di bawah 500 ribu rupiah, jauh lebih kecil dibandingkan total biaya pengobatan yang mencapai lebih dari 20 juta rupiah.

Sementara itu, respon positif masyarakat dan aparat desa terhadap inisiatif program ini terus bergulir. Aparat desa dan Puskesmas turut aktif mengorganisir warganya untuk terlibat. Pasien yang ditemukan menderita kelainan pada payudaranya didampingi oleh para kader kesehatan dan PKK setempat untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Melalui cara ini, diharapkan pengetahuan dan ketrampilan deteksi dini kanker payudara serta kesadaran atas hak jaminan pelayanan kesehatan khususnya warga miskin terus berkembang di masa datang.

Penyuluhan mengenai kanker payudara oleh tenaga medis dari Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta serta bidan setempat di wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara.



Saya atas nama warga mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan kanker payudara serta penyuluhan dan konsultasi hukum dan HAM. Saya berharap kegiatan-kegiatan Yappika di sini berkelanjutan karena dalam konteks pemberdayaan masyarakat penting melibatkan multistakeholder.

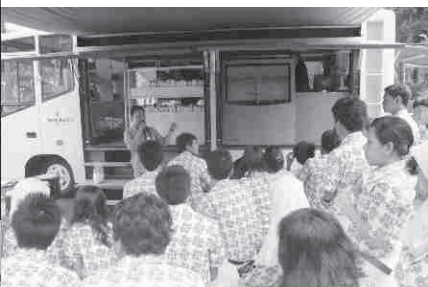
(Muhammad Iqbal, ME, Lurah Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara)

Kerja-Kerja Kolaboratif untuk Mengkomunikasikan Hak Pelayanan Publik dengan Yappika Life

Dalam waktu relatif singkat, Yappika Mobile Library & cafe (Yappika Life) telah berhasil menjangkau beberapa kelompok masyarakat dalam rangka mengkomunikasikan hak pelayanan publik yang adil dan berkualitas. Hak atas pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan serta informasi mengenai hukum dan HAM menjadi titik masuk Yappika dalam mengkomunikasikan hak pelayanan publik tersebut. Lebih dari 800 orang kelompok perempuan di Kecamatan Koja Jakarta Utara telah mengikuti penyuluhan mengenai kanker payudara, lebih dari 500 orang warga desa Legok Tangerang menikmati layanan penyuluhan kesehatan lingkungan dari Puskesmas setempat bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS). Ratusan siswa dari 8 sekolah juga terlibat dalam kampanye hak pelayanan publik di bidang pendidikan melalui diskusi yang dimoderasi oleh relawan Yappika, sekaligus memanfaatkan fasilitas internet dan perpustakaan Yappika Life.

Capaian tersebut terjadi berkat kerja-karya kolaboratif yang dilakukan Yappika dengan pihak lain menggunakan Yappika Life sebagai media komunikasi dalam menjalankan berbagai inovasi kegiatan. Kolaborasi dapat terjadi karena ada irisan kepentingan para pihak dengan tujuan-tujuan Yappika dalam mendorong pemenuhan hak-hak pelayanan publik dasar. Pihak-pihak yang telah bekerja sama melaksanakan kegiatan atau program dengan Yappika Life di antaranya adalah Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta (YKPJ), mahasiswa UNIS Tangerang, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komnas HAM, Kecamatan Koja Jakarta Utara (Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kelurahan Tugu Utara dan Kelurahan Lagoa) serta beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta dan Bogor.

Tantangan terbesar dalam kerja-karya kolaboratif adalah membangun kepercayaan pihak lain kepada Yappika. Tantangan ini sangat terasa ketika bekerja sama dengan komunitas masyarakat. Kejelasan tujuan, dampak, tindak lanjut jangka panjang dari kegiatan, keseriusan menggarap kegiatan serta irisan kepentingan kedua belah pihak menjadi kunci pendekatan untuk membangun kepercayaan komunitas. Dalam hal ini, kehadiran Yappika Life sebagai media komunikasi cukup mendukung proses-proses tersebut.



Diskusi dan pemutaran film tentang perdamaian di Yappika Life pada peringatan Hari Perdamaian Internasional di SMA 39 kerja sama dengan Jaringan Cinta Damai.

UPAYA MENKOMBINASIKAN PROFESIONALISME DAN LEGITIMASI DALAM ADVOKASI: TANTANGAN DAN POTENSI KEBERLANJUTANNYA

Oleh: Hetifah Syaifudin

(Seorang dari dua orang tim evaluator eksternal program TPLD Yappika)

Di awal desentralisasi, muncul suatu kritik atas kerja-kerja advokasi yang telah dilakukan berbagai organisasi *civil society* di Indonesia yaitu lemahnya ikatan dengan konstituen atau kelompok-kelompok masyarakat yang diperjuangkan nasibnya. Oleh sebab itu, satu tantangan yang dihadapi *civil society* di Indonesia adalah penguatan komunitas khususnya kelompok-kelompok marjinal dan jaringan di antara mereka agar mampu menjadi pelaku aktif dalam advokasi kebijakan. Masalah lain yang dihadapi *civil society* dalam upaya mempengaruhi kebijakan publik adalah terbatasnya logistik dan pengetahuan tentang metode dan teknik advokasi maupun kemampuan teknis dalam isu-isu tertentu yang diperjuangkan. Banyak dari *civil society* tidak cukup familiar dengan proses dan prosedur perencanaan, penganggaran, maupun pengadaan barang dan jasa publik. Akibatnya, banyak dari mereka menjadi kurang bisa memanfaatkan kesempatan yang tersedia untuk melakukan intervensi dan kurang trampil melakukan lobby secara efektif.

Bagi kebanyakan organisasi *civil society* yang sebelumnya berhadapan dengan pemerintah sebagai lawan atau musuh, bekerja dengan pemerintah sebagai mitra tidaklah mudah. Perubahan strategi ini sudah barang tentu akan membawa implikasi pada pengembangan kapasitas yang diperlukan *civil society* untuk mampu mempengaruhi kebijakan publik secara efektif. Jika pada masa yang lampau peningkatan kapasitas lebih banyak terkonsentrasi pada upaya untuk mengajarkan para aktivis dan pekerja advokasi sejumlah instrumen dan teknik untuk merumuskan kebijakan dan mengawal implementasinya, maka saat ini hal itu sudah tidak memadai lagi. Saat ini, advokasi harus mengkombinasikan kemampuan penelitian dan perolehan informasi, pemahaman akan aturan dan prosedur pemerintahan, lobby dan negosiasi, serta kerja-kerja pengorganisasian komunitas sekaligus. Jika pada masa lalu pengorganisasian rakyat di dalam rangkaian kerja advokasi lebih banyak ditujukan untuk menggalang kekuatan penekan kepada para pembentuk kebijakan dan seringkali sifatnya adalah pengorganisasian yang bersifat jangka pendek dan berbasis pada kasus, maka saat ini kerja-kerja pengorganisasi komunitas harus dilakukan terintegrasi dengan advokasi kebijakan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

YAPPIKA mencoba merespons situasi di atas dalam program Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TPLD) sejak tahun 2003. Dan jika saat ini kapasitas *civil society* di berbagai daerah di Indonesia untuk berperan secara efektif dalam proses advokasi kebijakan di daerah telah terbangun dan menjadi lebih matang, sebagian dari kredit tentunya bisa diberikan kepada YAPPIKA. Melalui interaksi yang intensif selama beberapa tahun, berbagai organisasi *civil society* yang menjadi partner YAPPIKA telah mengalami proses pematangan dalam beberapa aspek:

- Pengelolaan dan praktik-praktik internal organisasi *civil society* berkembang menjadi lebih inklusif, transparan, dan demokratis. YAPPIKA dan organisasi partnernya tidak mentolerir adanya kepentingan sektarian, praktik-praktik korupsi dan patronase yang akan mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Standar yang tinggi telah diterapkan dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan maupun pengambilan keputusan di dalam organisasi.

- Melalui Program TPLD YAPPIKA dan organisasi mitranya tidak sekedar berkesempatan belajar berinteraksi dengan pemerintah, bahkan sudah berhasil membangun kepercayaan dengan pengambil keputusan di tingkat nasional maupun di daerah dan menjadi partner kritis dalam pembuatan berbagai kebijakan.
- Kesempatan membangun jaringan dan kerjasama antar daerah untuk mendesakkan suatu pembaruan di level regional atau nasional.
- Kemampuan mengkombinasikan berbagai teknik dan instrumen dalam menjalankan advokasi yang berbasis komunitas.

Segala kerja-kerja serius dan dedikasi YAPPIKA adalah suatu investasi yang tidak ternilai. Warna baru dalam kerja-kerja advokasi telah dibentuk oleh YAPPIKA bersama jaringannya yaitu mencari keseimbangan antara profesionalisme dan efektivitas mencapai perubahan kebijakan dengan aktivisme dari suatu gerakan sosial. Penekanan terhadap bagaimana proses advokasi dijalankan, bagi YAPPIKA dan mitranya tidak kurang pentingnya jika dibandingkan dengan output dari kerja advokasi tersebut. Selain itu kepekaan gender menjadi satu nilai yang telah disuntikkan dalam seluruh kegiatan YAPPIKA dan partnernya. Oleh sebab itu, usulan kebijakan yang diadvokasikan oleh YAPPIKA maupun mitra-mitranya dihasilkan dari proses partisipasi meluas yang melibatkan bahkan organisasi-organisasi rakyat atau komunitas di tingkat sangat lokal (kampung atau desa), termasuk juga kelompok-kelompok perempuan.

Walaupun YAPPIKA dan mitranya tetap konsisten mendudukkan pengorganisasian komunitas sebagai tulang punggung advokasi, dominasi paradigma dan penekanan yang berlebihan ke arah profesionalisasi kerja-kerja advokasi belakangan ini menjadikan proses pengorganisasian dasar dan pembentukan kekuatan kolektif rakyat dalam advokasi dianggap menjadi kurang penting, bahkan sering diabaikan. Banyak organisasi *civil society* yang lebih menekankan hasil advokasi (perubahan dalam mekanisme pemerintahan dan peraturan) dan bukan prosesnya (asistensi untuk penguatan organisasi rakyat). Menekankan profesionalisme dalam advokasi menyebabkan banyak organisasi *civil society* mulai melihat kerja-kerja advokasi yang dilakukannya sebagai bagian dari upaya perolehan pendapatan, bahkan perolehan keuntungan. Spirit *volunteerism* otomatis menjadi tererosi, sejalan dengan pandangan sebagian aktivis NGOs bahwa kerja advokasi adalah karir. Situasi dilematis ini tentunya bukan semata menjadi tanggung jawab YAPPIKA melainkan tantangan yang perlu dihadapi seluruh komponen *civil society* di Indonesia untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang demokratis di Indonesia.

Sebagai organisasi yang ingin terus belajar, Yappika selalu melakukan perencanaan strategis. Bulan September 2007, kegiatan tersebut dilakukan untuk membuat perencanaan strategis periode 2008 – 2012. Kegiatan yang melibatkan pengurus, pembina, pengawas dan seluruh staf ini berhasil merumuskan rencana strategis Yappika dalam 5 tahun ke depan sebagai berikut:

- **Visi**

Terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis dan mandiri untuk memperjuangkan hak-haknya.

- **Misi**

- (1) Mengembangkan Yappika sebagai wahana pembelajaran demokrasi berdasarkan pengalaman nyata lapangan secara terus menerus
- (2) Melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas organisasi masyarakat sipil dalam rangka membangun kemandiriannya serta mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik di berbagai tingkatan
- (3) Melakukan advokasi kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar rakyat, termasuk kebijakan-kebijakan yang mendorong pengembangan organisasi masyarakat sipil yang sehat
- (4) Mendorong terbangunnya sinergi antar organisasi masyarakat sipil dalam rangka memperjuangkan demokrasi dan hak-hak dasar rakyat.

- **Peran**

Yappika merupakan bagian dari sistem pendukung gerakan masyarakat sipil, dengan peran utama sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kapasitas dan memberikan bantuan teknis kepada organisasi masyarakat sipil (OMS)
- (2) Membangun sinergi antar organisasi masyarakat sipil (OMS)
- (3) Melakukan pendidikan publik
- (4) Melakukan advokasi isu-isu nasional
- (5) Menyambungkan isu advokasi lokal untuk jaringan advokasi nasional.

- **Isu Strategis**

Isu-isu strategis untuk program Yappika 2008 – 2012 adalah:

- (1) Mendorong kebijakan yang efektif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar rakyat
- (2) Penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk memperjuangkan hak-hak dasar rakyat
- (3) Penguatan kapasitas Yappika menjadi organisasi yang mandiri dan berkelanjutan sebagai sistem pendukung yang efektif bagi rakyat dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya.

Empat Belas (14) Nilai-Nilai Dasar yang Dianut Yappika

NILAI DASAR	URAIAN PENGERTIAN
Akuntabel	Di dalam menjalankan perannya, Yappika bertanggung-gugat atas seluruh yang dilakukan kepada <i>stakeholder</i> kunci dan publik.
Transparan	Segala sesuatu yang dilakukan Yappika dapat diakses oleh publik.
Egaliter	Tidak bias kedudukan dan menjunjung kesetaraan bagi tiap bagian organisasi, maupun bagi mitra kerja, dalam memberikan masukan/input, kritik/ketidaksetujuan, dan saran-saran.
Anti kekerasan	Yappika tidak mempraktekkan/ menggunakan dan tidak memberikan toleransi terhadap kekerasan fisik maupun psikis.
Partisipatif	Yappika selalu berusaha melibatkan pihak yang berkepentingan dalam proses-proses pengambilan keputusan.
Voluntary	Staf Yappika memiliki dedikasi untuk bekerja demi kepentingan bersama melebihi imbalan yang bisa diberikan oleh lembaga.
Non- eksploitatif	Yappika tidak melakukan eksploitasi terhadap staf, relawan, dan mitra kerjanya.
Non Partisan	Yappika tidak berafiliasi (tidak menjadi bagian dari, bertanggung-jawab kepada, dan bekerja untuk) partai politik dan calon independen yang bertarung untuk menduduki jabatan pemerintahan, tetapi dapat bekerja sama dengan partai politik untuk memperjuangkan visi dan misi Yappika. Seluruh staf dan organ yayasan tidak boleh menjadi fungsionaris partai.
Keberpihakan kepada kelompok marjinal	Dalam perumusan program-programnya selalu berorientasi pada pemenuhan hak-hak kelompok marjinal dan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok marjinal yang terlibat dalam kegiatan Yappika.
Toleransi	Yappika menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, sikap dan perilaku; atas dasar agama, ideologi, suku, ras, dan jenis kelamin; serta menjunjung tinggi keputusan bersama.
Non Profit	Surplus yang diperoleh atas usaha lembaga dimanfaatkan untuk pelayanan dan tidak dibagikan kepada fungsionaris yayasan.
Profesional	Yappika bekerja mengedepankan kualitas hasil kerja memenuhi standar yang ditentukan (efektif dan efisien), dan selalu mengembangkan inovasi yang diperoleh dari hasil pembelajaran berkelanjutan bagi lembaga dalam rangka memperbaiki pelayanan.
Keberlanjutan	Yappika mengutamakan prinsip keberlanjutan dan oleh karenanya dalam setiap pelayanan yang diberikan akan berorientasi kepada “pemberdayaan”, memungkinkan penerima manfaat agar mandiri.
Tidak menerima pendanaan yang bersumber dari: (1) Hutang luar negeri (2) Perusahaan yang jelas-jelas diketahui melakukan kerusakan lingkungan, mempekerjakan buruh anak, merugikan buruh dan melanggar HAM (3) Pihak-pihak yang melakukan praktek-praktek korupsi di dalam penyaluran dana bantuannya (4) Kerja sama secara langsung dengan lembaga keuangan internasional.	

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Yappika menjalankan berbagai program yang selalu dilaksanakan dalam bentuk kemitraan dengan lembaga lain maupun para individu. Selama periode April 2007 – Maret 2008, kemitraan yang telah kami bangun, di antaranya adalah:

Program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil Aceh

Yappika bekerjasama dengan USC Canada dan Canadian International Development Agency (CIDA) memberikan dukungan dana maupun asistensi teknis kepada 16 lembaga mitra di Aceh, yaitu:

1. **Banda Aceh:** Aceh Development Fund (ADF), Impact, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Aceh (LPPM), Pusat Gerakan dan Advokasi Rakyat (PUGAR)
2. **Aceh Utara:** Bina Masyarakat (BIMA), Lembaga Swadaya Pembangunan Nasional (LSPENA), Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh (PASKA), Lembaga Swadaya Masyarakat Pengembangan Ekonomi Rakyat (PERAK)
3. **Aceh Jaya:** Masyarakat Transparansi Peduli Aceh Jaya (MATARAJA), Masyarakat Partisipasi Aceh Jaya (MP), Yayasan Pembela Petani dan Nelayan (PAPAN),
4. **Aceh Barat:** Flower Aceh Meulaboh, Yayasan Pengembangan Kawasan (YPK)
5. **Aceh Singkil:** Yayasan Demokrasi untuk Negeri (DAUN), Rabithah Thaliban Aceh (RTA)
6. **Aceh Besar:** Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani (YSPDI)

Program Tata Pemerintahan Lokal yang Demokratis (TPLD)

Yappika bekerjasama dengan USC Canada dan Canadian International Development Agency (CIDA) memberikan dukungan dana maupun asistensi teknis kepada 24 lembaga mitra di beberapa daerah. Seluruh program TPLD yang telah berlangsung sejak tahun 2003 ini, berakhir pada bulan Maret 2007. Berikut ini adalah mitra-mitra yang pernah didukung oleh program TPLD:

1. **Papua:** Triton (Sorong), Yayasan Nanimi Wabili Su (YNWS - Sorong), Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRA - Jayapura)
2. **Maluku Tenggara:** Yayasan Hivlak (Tual)
3. **Sulawesi Selatan:** Yayasan Pendidikan Rakyat Bulukumba, Yayasan Bumi Sawerigading Palopo, Yayasan Tumbuh Mandiri (YTMI-Makassar), Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR - Makassar)
4. **Sulawesi Tengah:** Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (Palu), Yayasan Pendidikan Rakyat Palu (YPR Palu), YAMMI (Palu), Dopalak Indonesia (Donggala)
5. **Nusa Tenggara Timur:** Yayasan Peduli Sesama (SANLIMA), YAPRITA, YBS Lembata, Yayasan Flores Sejahtera (SANRES)
6. **Jawa Timur:** Yayasan Prakarsa Swadaya Masyarakat (YPSM - Jember), SD INPERS (Jember), IDFOS (Bojonegoro), Malang Corruption Watch (MCW)
7. **Aceh:** Aceh Development Fund (ADF – Banda Aceh), Yayasan Pengembangan Kawasan (YPK – Meulaboh)
8. **Jakarta:** Jaringan Tambang (JATAM), Civic Education and Budget Transparency (CIBA)

Advokasi RUU Pelayanan Publik

Yappika bekerjasama dengan USC Canada dan CIDA melalui program TPLD memfasilitasi berbagai kegiatan advokasi RUU Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) dimana Yappika berperan sebagai sekretariat jaringan. Jaringan MP3 saat ini beranggotakan 33 lembaga yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta, Malang, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Program Penguatan Kapasitas Jaringan Kerja Masyarakat Sipil Kabupaten

Yappika bekerjasama dengan ACCESS dan IDSS menjalankan program di 8 Kabupaten:

1. Jaringan Masyarakat Sipil (Jaringmas) Bantaeng (Sulawesi Selatan)
2. Aliansi Masyarakat Sipil Turatea (AMST) Jeneponto (Sulawesi Selatan)
3. Jaringan Masyarakat Sipil Buton (Sulawesi Tenggara)
4. Jaringan Masyarakat Sipil Muna (Sulawesi Tenggara)
5. Kelompok Kerja Masyarakat Sipil (KKMSK) Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat)
6. Kelompok Kerja Masyarakat Sipil (KKMSK) Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat)
7. Jaringan Masyarakat Sipil Sumba Barat (Nusa Tenggara Timur)
8. Simpul 16 + + Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur)

Program Deteksi Dini Kanker Payudara

1. Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta (YKPJ)

Pelibatan Relawan

Yappika melibatkan relawan, khususnya dari kalangan muda dalam kerja-kerja yang dilakukannya. Jumlah relawan dari kalangan muda yang pernah tercatat terlibat di Yappika mulai tahun 2003 – Maret 2008 adalah 270 orang. Sebagian besar relawan adalah mahasiswa dan atau *fresh graduate* dari 12 perguruan tinggi di Jakarta, Depok dan Tangerang. Pada periode April 2007 – Maret 2008 ini, tercatat 35 orang aktif sebagai relawan di Yappika.”

• **MAJALAH**

Yappika didukung oleh USC Canada dan CIDA telah menerbitkan majalah berbahasa Indonesia dengan tajuk ALIANSI sejak bulan November 1999 hingga saat ini. Majalah ini terbit tiap 2 bulan, dan pada tahun 2002 sempat terbit tiap bulan. Pada periode April 2007 – Maret 2008, ALIANSI telah terbit 4 kali dengan beragam tema, yaitu:

1. **Kesejahteraan Ditolak Buruh Bergolak.** Vol. 35 No. XXXIX April Mei 2007.
2. **Menuntut Perlindungan Negara.** Vol. 36 No. XL Juni Juli 2007.
3. **Saatnya Rakyat Dilayani.** Vol. 37 No. XLI Agustus September 2007.
4. **Membangun Posisi Tawar Rakyat.** Vol. 38 No. XLII Oktober November 2007
5. **Mengagas sebuah Otonomi Desa.** Vol. 39 No. XLIII Desember 2007 Januari 2008

• **BUKU-BUKU**

1. **A long Journey to A Civil Society: CIVICUS Civil Society Index for the Republic of Indonesia.**
Oleh Rustam Ibrahim, 2007. Bahasa Inggris. Diterbitkan atas kerja sama Yappika dengan ACCESS.
2. **Kebenaran akan Terus Hidup.**
Oleh Wiji Thukul dan Wilson (penulis tambahan), 2007. Bahasa Indonesia. Diterbitkan atas kerja sama Yappika dengan Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI). Didukung oleh USC Canada dan CIDA.
3. **Aliansi untuk Kedaulatan Warga Negara yang Aktif.**
Oleh Ruth Indiah Rahayu, 2007. Bahasa Indonesia. Didukung oleh USC Canada dan CIDA.
4. **Menguak Tabir Menerjang Badai: Rekaman Rasionalitas Potret Penguatan Masyarakat Adat Biboki, Insana, Miomaffo.**
Oleh Marthen Duan, 2007. Bahasa Indonesia. Diterbitkan atas kerja sama Yappika dengan Yayasan Timor Membangun. Didukung oleh USC Canada dan CIDA.
5. **Pembelajaran yang Berkelanjutan : Laporan Tahunan Yappika 2006-2007.**
Bilingual. Didukung oleh USC Canada dan CIDA.
6. **Reformasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen,**
oleh Eko Prasjo dan penulis tambahan (Teguh Kurniawan, Defny Holidin), 2007. Bahasa Indonesia. Diterbitkan atas kerja sama Yappika dan Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI. Didukung oleh USC Canada dan CIDA.
7. **Wajah Buram Pelayanan Publik.**
Oleh Luthfi J. Kurniawan dan penulis tambahan (Hesti Puspitosari, Sirajuddin, Isa Wahyudi), 2007. Bahasa Indonesia. Diterbitkan atas kerja sama antara Yappika dengan Malang Corruption Watch (MCW). Didukung oleh USC Canada dan CIDA.
8. **Gerakan Ekstra Parleментар baru: Mendorong Demokrasi di Tingkat Lokal.**
Oleh Nor Hicmah, Muthmainah Korona, Luthfi J. Kurniawan, Aditya Perdana dan Ahmad Yani, 2008. Bahasa Indonesia. Didukung oleh USC Canada dan CIDA.
9. **Mengawal Demokrasi: Pengalaman Jaringan Demokrasi Aceh dan RUU PA.**
Oleh Tim Penulis Salemba Tengah, 2008. Bahasa Indonesia. Didukung oleh USC Canada dan CIDA.

No. : A/255/YS/SB/08

Laporan Auditor Independen

Kepada Yth,
Direktur Eksekutif
YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI
Jalan Pedati No. 20, RT 007/09
Jakarta Timur 13350

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, dan laporan aktivitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen YAPPIKA. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Sesuai dengan catatan 3a, laporan keuangan disajikan dengan basis kas yang dimodifikasi, yang merupakan suatu basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Sesuai dengan catatan 8 atas laporan keuangan, YAPPIKA mencatat aktiva tetap yang diperoleh dari dana hibah sebagai aktivasnya dan mencatat penyusutannya, meskipun belum memiliki surat hibah atas aktiva tetap dari donor.

Menurut pendapat kami, kecuali untuk hal yang dijelaskan pada paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan YAPPIKA tanggal 31 Desember 2007 dan 2006, hasil aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang dijelaskan pada catatan 3a.

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Penjelasan tambahan terlampir disajikan sebagai analisa tambahan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Informasi tambahan tersebut telah menjadi subjek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan.



Drs. Theo Kusnawara, Ak.
Izin Akuntan Publik No. 02.1.0795
Izin Usaha KAP No. KEP-276/KM.6/2004

28 Maret 2008

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI**Laporan posisi keuangan**

Per 31 Desember 2007 dan 2006

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2007	2006
Aktiva			
Aktiva lancar			
Kas dan setara kas	4	2.833.975.424	3.180.289.047
Piutang program - bersih	3b, 5	219.490.754	418.394.279
Piutang lain-lain	6	214.848.797	393.013.970
Uang muka	7	1.266.862.851	1.997.594.266
Jumlah aktiva bersih		4.535.177.826	5.989.291.562
Aktiva tidak lancar			
Aktiva tetap	3c, 8		
Nilai perolehan		589.681.031	730.048.181
Akumulasi penyusutan		573.728.905	680.091.140
Jumlah aktiva tidak lancar		15.952.126	49.957.041
Jumlah aktiva		4.551.129.952	6.039.248.603

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI**Laporan posisi keuangan (lanjutan)**

Per 31 Desember 2007 dan 2006

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2007	2006
Kewajiban dan aktiva bersih			
Kewajiban			
Kewajiban lancar			
Hutang lain-lain	9	444.383.779	625.154.714
Hutang pajak	10	31.343	29.988.253
Jumlah kewajiban lancar		444.415.122	655.142.967
Aktiva bersih			
Sisa dana	3d		
Terikat	11a	1.731.156.042	3.211.216.350
Tidak terikat	11b	2.375.558.788	2.172.889.286
Jumlah aktiva bersih		4.106.714.830	5.384.105.636
Jumlah kewajiban dan aktiva bersih		4.551.129.952	6.039.248.603

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI Laporan Aktivitas

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 dan 2006

(Dalam Rupiah)

	Catatan		2007		2006	
	Terikat	Tidak terikat	Jumlah	Jumlah		
Penerimaan	12					
Penerimaan program	15.409.308.408	-	15.409.308.408	13.389.052.132		
Penerimaan lain-lain	-	555.018.336	555.018.336	509.805.793		
Jumlah penerimaan	15.409.308.408	555.018.336	15.964.326.744	13.898.857.925		
Pengeluaran	13					
CSO – Capacity Building in Aceh	9.410.407.158	-	9.410.407.158	1.651.463.282		
Canadian International Development Agency (CIDA) melalui Unity	5.391.825.375	-	5.391.825.375	7.437.062.924		
Service Committee of Canada (USC – Canada) – PPD Tahap II	1.483.522.367	-	1.483.522.367	791.123.578		
ACCESS	420.968.759	-	420.968.759	-		
Access Bridging	37.461.752	-	37.461.752	566.043.021		
ACCESS National	11.447.955	-	11.447.955	-		
Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta (YKPP)	-	-	-	1.694.509.805		
United Nations Development Programme (UNDP) – Partnership	-	-	-	1.058.716.675		
DRSP – RTI	-	-	-	126.084.546		
The Asia Foundation	-	-	-	384.278.302		
Administrasi	-	352.348.834	352.348.834	-		
Jumlah pengeluaran	16.755.633.366	352.348.834	17.107.982.200	13.709.282.133		
Sisa dana, tahun berjalan	(1.346.324.958)	202.669.502	(1.143.655.456)	189.575.792		
Sisa dana, awal	3.211.216.350	2.172.889.286	5.384.105.636	5.194.744.736		
Koreksi atas sisa dana	11	-	(133.735.350)	(214.892)		
Sisa dana, akhir	1.731.156.042	2.375.558.788	4.106.714.830	5.384.105.636		

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI**Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 dan 2006

(Dalam Rupiah)

	2007	2006
Arus kas dari aktivitas operasi		
Sisa dana, tahun berjalan	(1.143.655.456)	189.575.792
Penyesuaian untuk rekonsiliasi sisa dana ke kas yang digunakan untuk aktivitas operasi		
Koreksi atas sisa dana	(133.735.350)	(214.892)
Penyusutan	38.757.873	88.214.315
Kerugian atas penghapusan aktiva tetap	1.147.042	-
Kenaikan (penurunan) pada:		
Piutang program	198.903.525	(9.775.303)
Piutang lain-lain	178.165.173	(308.490.432)
Uang muka	730.731.415	(1.143.054.533)
Kenaikan (penurunan) pada:		
Hutang lain-lain	(180.770.935)	145.647.731
Hutang pajak	(29.956.910)	13.916.508
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(340.413.623)	(1.024.180.814)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Perolehan aktiva tetap	(5.900.000)	-
Kas digunakan untuk aktivitas pendanaan	(5.900.000)	-
Penurunan dalam kas dan setara kas	(346.313.623)	(1.024.180.814)
Saldo kas dan setara kas awal tahun	3.180.289.047	4.204.469.861
Saldo kas dan setara kas akhir tahun	2.833.975.424	3.180.289.047

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

LAPORAN AKTIVITAS DAN SALDO DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

	DESCRIPTION	2007	2006
PENERIMAAN			
	Kontribusi Lembaga Donor		
	01. USAID	-	
	02. USC Canada (PPD 2)	5,456,701,500	5,601,893,530
	03. USC Canada (ANCORS)	7,779,647,831	5,446,333,755
	04. ACCESS	1,491,567,114	646,790,800
	05. Partnership	127,418,817	-
	06. HIVOS - Transparancy International Indoensia (TI)		
	07. OXFAM	39,964,600	
	08. UCS Canada - Tsunami Aceh Fund		
	09. Research Triangale Institute (RTI)		539,171,914
	10. ACCESS National	-	452,609,245
	11. Overseas Development Institute (ODI)		8,603,003
	12. The Asia Foundation	34,984,546	91,100,000
	13. Democratic Reform Support Project (DRSP)	-	602,549,885
	14. ACCSES Bridging Fund	447,324,000	-
	15. Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta (YKPJ)	31,700,000	
	Total Kontribusi Lembaga Donor	15,409,308,408	13,389,052,132
	16. YAPPIKA	555,018,336	509,805,793
	TOTAL PENERIMAAN	15,964,326,744	13,898,857,925
PENGELUARAN			
	Manajemen Kantor		
	01. Gaji untuk manajemen (12 orang)	946,731,034	960,262,142
	02. Gaji untuk pelaksanaan program (10 orang)	986,966,813	911,541,539
	03. Biaya kantor	506,611,878	670,627,991
	04. Biaya perjalanan dan pertemuan	279,937,947	672,958,994
	05. Peningkatan kapasitas staf	27,641,000	74,796,490
	Sub total Manajemen Kantor	2,747,888,672	3,290,187,156
	Aktivitas Program		
	06. Program Kemitraan dan Pembangunan - PPD 2	3,888,621,254	5,340,953,926
	07. Penguatan Kapasitas di Aceh - ANCORS	8,706,584,706	953,102,820
	08. Indeks Masyarakat Sipil di Kabupaten - ACCESS	1,392,082,790	602,720,796
	09. Indeks Masyarakat Sipil di Nasional - ACCESS	25,672,000	447,941,314
	10. ACCSES Bridging Fund	330,380,545	-
	11. Program Desentralisasi - Partnership		1,623,965,783
	12. Membuat assessment tentang kebijakan lingkungan-DRSP		1,058,716,675
	13. Membuat assessment tentang kebijakan lingkungan - TAF		126,084,546
	14. Dukungan Program - Yappika	5,304,279	265,609,117
	15. Program - Pelayanan Publik (Breast Cancer)	11,447,955	
	Sub total Aktivitas Program	14,360,093,528	10,419,094,977
	TOTAL PENGELUARAN	17,107,982,200	13,709,282,133
	Kelebihan Penerimaan atas Pengeluaran	(1,143,655,456)	189,575,792
	Saldo Awal	5,384,105,636	5,194,744,736
	Koreksi atas Saldo dana	(133,735,350)	(214,892)
	Saldo Akhir	4,106,714,830	5,384,105,636